

INTEGRASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERSIAPAN PEMILU DAN KEGIATAN SOSIAL MASYARAKAT

**Michelle¹, Rudi Candra, S.Ak.,MM, Shania Letisha, Caroline, Melliza Dwicahyani,
Richard Shakespeare, Delvi Yani, Melvin, Suyanto, Winson, Vivian Natalia Gautama,
Delisya Enderlina, Richard, Winson, Jhuandro Luish, Andhie Febrian**

Universitas Internasional Batam
E-mail: 2346014.michelle@uib.edu¹

ABSTRAK

Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam persiapan pemilu dan kegiatan sosial Masyarakat memiliki peran penting dalam membangun kesatuan dan kedamaian nasional. Dalam persiapan pemilu, nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman dalam memilih calon pemimpin yang berintegritas, adil, dan bijaksana. Pemilu yang berlandaskan pada Pancasila akan menghindarkan masyarakat dari konflik dan memperkuat demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah dan mufakat. Selain itu, kegiatan sosial yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dapat mempererat hubungan antarwarga, menciptakan lingkungan yang harmonis, serta mendorong terciptanya keadilan sosial.

Kata kunci: Pancasila, pemilu, kegiatan sosial, integrasi nilai, demokrasi, keadilan sosial.

ABSTRACT

Integration of Pancasila values in election preparations and community social activities has an important role in building national unity and peace. In preparation for elections, Pancasila values can be used as a guideline in selecting leadership candidates who have integrity, fairness and wisdom. Elections based on Pancasila will prevent society from conflict and strengthen democracy based on deliberation and consensus. Apart from that, social activities based on Pancasila values can strengthen relations between citizens, create a harmonious environment, and encourage the creation of social justice.

Keywords: Pancasila, elections, social activities, integration of values, democracy, social justice.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan. Sejarah menunjukkan bahwa Pemilu telah menjadi sarana utama bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatan mereka sejak era kemerdekaan. Pemilu bertujuan tidak hanya untuk memilih pemimpin tetapi juga untuk menjamin bahwa proses tersebut berlangsung secara adil, jujur, dan transparan. Kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu sangat bergantung pada integritas dan kredibilitas proses tersebut.

Pengawasan Pemilu adalah elemen krusial dalam memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan. Latar belakang pelaksanaan pengawasan Pemilu dapat ditelusuri dari berbagai insiden dan tantangan yang muncul dalam sejarah Pemilu, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain. Kasus kecurangan, manipulasi suara, dan pelanggaran lainnya yang terjadi pada Pemilu sebelumnya telah menginspirasi perlunya pengawasan ketat. Fakta bahwa Pemilu adalah pilar utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat menuntut adanya

mekanisme pengawasan yang dapat menjamin integritas setiap tahapan Pemilu.

Upaya pengawasan Pemilu telah dilakukan oleh berbagai pihak sepanjang sejarah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu terus berupaya untuk meningkatkan standar operasional dan prosedur agar setiap tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga berperan penting dalam memastikan bahwa proses Pemilu bebas dari kecurangan dan pelanggaran. Partisipasi aktif dari masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah (NGO), dan media massa juga turut berkontribusi dalam mengawal jalannya Pemilu.

Tujuan dari pengawasan Pemilu adalah untuk memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran yang dapat merugikan keadilan Pemilu. Selain itu, pengawasan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik terhadap proses Pemilu sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Melalui pengawasan yang ketat, diharapkan tercipta Pemilu yang

bersih, jujur, dan adil yang pada akhirnya memperkuat legitimasi pemerintahan yang terpilih.

MASALAH

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi memberikan kebebasan tetapi juga mementingkan partisipasi setiap individu warga dalam urusan politik negara. Tujuan utama dari sistem demokrasi ini adalah agar setiap masyarakat negara memiliki hak yang sama dalam bersuara untuk negara sehingga tercipta kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu, serta menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah. Dengan demikian, demokrasi menjamin bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama dan harus dihormati dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, tidak semua masyarakat memiliki pandangan positif terhadap kegiatan sosial maupun politik negara, termasuk Pemilu. Perbedaan pendapat dan pilihan tiap individu dapat menyebabkan perselisihan atau konflik antar sesama. Selain itu, ada juga fenomena apatisisme politik di mana sebagian

masyarakat merasa bahwa partisipasi mereka dalam Pemilu tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Hal ini dapat mengurangi tingkat partisipasi dan merusak legitimasi hasil Pemilu. Konflik horizontal antar pendukung calon atau partai politik juga sering terjadi terutama di masa kampanye yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan.

Banyak juga kasus di mana masyarakat melanggar aturan dan melakukan kecurangan dalam pemilihan suara. Praktik-praktik seperti politik uang, intimidasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan manipulasi hasil suara adalah beberapa contoh kecurangan yang sering terjadi. Hal ini menjadi tantangan yang harus dihadapi setiap Pemilu karena dapat merusak keadilan dan integritas proses Pemilu. Kecurangan dalam Pemilu tidak hanya merugikan calon atau partai politik yang bersaing secara jujur, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa Pemilu berlangsung secara adil dan bebas dari segala bentuk kecurangan.

Karena itulah dibentuklah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan bahwa pemilihan suara terlaksana secara bersih, jujur, adil, dan tanpa pelanggaran atau

kecurangan. Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu, mulai dari persiapan, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan dan penetapan hasil Pemilu. Bawaslu juga berwenang untuk menindak pelanggaran dan kecurangan yang terjadi serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak terkait. Dengan adanya Bawaslu, diharapkan setiap tahapan Pemilu dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan setiap pelanggaran dapat ditindak secara tegas dan adil.

Proses ini wajib dilaksanakan karena demokrasi Pancasila adalah landasan terpenting dalam sistem demokrasi, dan nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman moral dan etika dalam seluruh tahapan Pemilu. Pancasila sebagai ideologi negara mengajarkan nilai-nilai seperti keadilan sosial, persatuan, kemanusiaan, dan kedaulatan rakyat, yang harus tercermin dalam setiap aspek pelaksanaan Pemilu. Dalam demokrasi Pancasila, Pemilu bukan hanya sekadar proses memilih pemimpin tetapi juga sebagai wujud partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pelaksanaan Pemilu yang bersih, jujur, dan adil adalah cerminan dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, Bawaslu memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga integritas dan kredibilitas Pemilu. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan setiap pelanggaran juga sangat penting untuk mendukung tugas Bawaslu. Hanya dengan kerjasama semua pihak mulai dari penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, hingga masyarakat luas, kita dapat mewujudkan Pemilu yang benar-benar demokratis, adil, dan berintegritas. Melalui upaya ini diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan proses Pemilu dapat terus meningkat, serta menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembangunan bangsa yang lebih baik di masa depan.

METODE

Dalam artikel ini, penulis dan kelompok menggunakan beberapa metode untuk memahami dan melaksanakan kegiatan Pemilu dan sosial.

1) Metode Penelitian

- Penelitian dilakukan secara sistematis dengan tujuan menemukan hasil atau data tertentu.
- Metode kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam peran Pancasila dalam Pemilu di Indonesia.

- Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan penekanan pada deskripsi dan analisis fenomena yang diamati.
- Diskusi bersama kelompok dan pihak yang berwenang dilakukan untuk lebih memahami dan merealisasikan kegiatan.

2) Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi:

- Observasi partisipan: Pengamatan langsung terhadap proses Pemilu di lapangan.
- Observasi non-partisipan: Pengamatan tidak langsung terhadap proses Pemilu di media sosial.

3) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan melibatkan beberapa langkah yang sistematis untuk mengolah data yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang berguna. Langkah pertama adalah pengumpulan data melalui dua jenis observasi. Observasi yang dilakukan pertama ialah pengamatan dan pemantauan terhadap sosial media mengenai kegiatan pemilu dan sosial. Terdapat dua hal yang perlu diamati disini, yang pertama adalah pembelajaran dan wawasan/pengetahuan mengenai pemilu dan kegiatan sosial dengan tujuan untuk menambahkan ilmu mahasiswa dalam hal

baru, dikarenakan banyaknya mahasiswa yang baru pertama kali terjun ke dunia politik negara. Yang kedua adalah pemantauan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk melaporkan bila adanya masyarakat yang melanggar ataupun melakukan tindakan kecurangan dalam kegiatan pemilu ataupun sosial. Kegiatan ini dilaksanakan dengan adanya kerjasama antara kampus Universitas Internasional Batam dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Observasi yang dilakukan selanjutnya adalah pengamatan proses berjalannya pemilu secara langsung di TPS masing-masing perumahan mahasiswa. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapat informasi data dari kegiatan pemilu yang ada di TPS masing-masing perumahan mahasiswa, beserta menambah pengalaman dan pengetahuan mahasiswa mengenai bagaimana kegiatan pemilu ini berlangsung.

Kemudian, data tersebut diolah dengan tujuan untuk memperoleh hasil dan informasi yang akurat dan terstruktur, sehingga memudahkan proses analisis lebih lanjut. Terakhir, penarikan kesimpulan dari data yang dianalisis dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam proyek ini.

4) Lokasi, Waktu, dan Durasi Kegiatan:

Proyek ini dilaksanakan di tempat yang berbeda-beda mulai November 2023 hingga Februari 2024, dengan durasi sekitar 3 bulan.

Berikut adalah jadwal dari pelaksanaan proyek :

KEGIATAN	LOKASI	TANGGAL
Sosialisasi Pemantauan kampanye Pemilu Tahun 2024	Pertemuan Online via Zoom	25 November 2023
Memposting konten pemilu di Sosial Media	-	27 November - 14 Februari 2024
Pengawasan Pelanggaran Pemilu di Sosial Media	-	27 November - 18 Februari 2024
Bimtek Pengawasan Pemungutan dan	Ruang Kelas Kampus UIB	26 Januari 2024

perhitungan Suara Pemilu		
Bimtek Alat Kerja Pemantauan Pemungutan dan Perhitungan Pemilu 2024	Pertemuan Online via Zoom	2 Februari 2024
Pemantauan Kegiatan Pemilu 2024	TPS masing-masing daerah perumahan	14 Februari 2024

PEMBAHASAN

1. Pentingnya Pemilu dalam Demokrasi

Pemilihan umum (Pemilu) adalah pilar utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk menentukan arah pemerintahan. Sejak era kemerdekaan, Pemilu telah menjadi sarana utama bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatan mereka. Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung secara adil, jujur, dan

transparan. Kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu sangat bergantung pada integritas dan kredibilitas proses tersebut. Oleh karena itu, sebuah sistem Pemilu yang transparan dan adil merupakan fondasi yang kokoh bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang dipilih. Dengan adanya Pemilu yang teratur, masyarakat merasa memiliki peran dan tanggung jawab dalam menentukan masa depan bangsa, sehingga memperkuat demokrasi itu sendiri. Partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam Pemilu adalah indikator sehatnya demokrasi, di mana setiap suara dihargai dan diperhitungkan dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik.

2. Pengawasan Pemilu

Pengawasan Pemilu adalah elemen penting untuk memastikan demokrasi berjalan adil dan transparan, mencegah penyimpangan dan pelanggaran. Dalam konteks ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berperan penting dalam mengawasi jalannya Pemilu. KPU bertanggung jawab untuk meningkatkan standar operasional pelaksanaan Pemilu, sementara Bawaslu bertugas untuk memastikan bahwa proses tersebut bebas dari kecurangan. Partisipasi aktif masyarakat, organisasi non-pemerintah

(NGO), dan media massa juga memegang peranan penting dalam mengawal Pemilu. Pengawasan yang efektif tidak hanya mendeteksi dan mencegah kecurangan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya Pemilu yang bersih dan transparan. Dengan pengawasan yang ketat dan independen, proses Pemilu dapat berjalan dengan baik, menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat, dan mencerminkan aspirasi seluruh elemen masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan ini adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu.

3. Tantangan dalam Demokrasi dan Peran Bawaslu

a. Logistik yang Menantang

Pengelolaan logistik Pemilu, termasuk distribusi surat suara dan peralatan pemungutan suara, sering kali menjadi tantangan besar. Daerah-daerah terpencil atau dengan infrastruktur transportasi yang terbatas memerlukan koordinasi logistik yang intensif untuk memastikan setiap pemilih dapat memberikan suaranya dengan tepat waktu. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai adalah hal yang krusial untuk memastikan kelancaran proses Pemilu.

b. Keamanan Selama Proses Pemilu

Keamanan selama proses Pemilu adalah hal krusial yang memerlukan pengawasan ketat. Ancaman seperti intimidasi, kekerasan, atau gangguan terhadap lokasi pemungutan suara dapat mengganggu proses Pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap hasilnya. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang baik antara aparat keamanan dan penyelenggara Pemilu untuk menciptakan suasana yang kondusif dan aman bagi para pemilih.

c. Partisipasi Masyarakat yang Rendah

Tantangan besar lainnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pemilu. Apatisme politik atau ketidakpercayaan terhadap sistem politik dapat mengurangi tingkat partisipasi, yang berpotensi meragukan legitimasi hasil Pemilu. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran politik dan edukasi pemilih sangat diperlukan. Kampanye sosialisasi yang efektif serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi dapat membantu meningkatkan partisipasi pemilih.

Indonesia sebagai negara demokrasi mementingkan partisipasi setiap warga dalam politik. Namun, tidak semua masyarakat

memiliki pandangan positif terhadap Pemilu, yang menyebabkan konflik dan kecurangan. Bawaslu dibentuk untuk memastikan Pemilu terlaksana bersih, jujur, dan adil, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tantangan terbesar adalah memastikan semua pihak, baik peserta Pemilu maupun masyarakat umum, memahami dan menghormati aturan main yang ada. Peran Bawaslu sangat penting dalam memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran, sehingga menumbuhkan efek jera dan menciptakan lingkungan Pemilu yang lebih baik. Selain itu, Bawaslu juga harus proaktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya Pemilu yang jujur dan adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, Bawaslu dapat membantu mewujudkan Pemilu yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, serta memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Pemilu adalah pilar utama dalam demokrasi yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah pemerintahan. Sejak era kemerdekaan, Pemilu menjadi sarana untuk mengekspresikan kedaulatan rakyat dan memilih pemimpin yang mewakili aspirasi kolektif. Integritas Pemilu sangat penting

untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasilnya, dengan pengawasan yang ketat dari KPU dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas independen.

Meskipun demikian, Pemilu dihadapkan pada berbagai tantangan seperti logistik kompleks, keamanan selama proses, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Bawaslu perlu terus berperan dalam mengatasi tantangan tersebut dengan menjaga transparansi, memberikan sanksi terhadap pelanggaran, dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

Dengan menjaga proses Pemilu yang bersih, jujur, dan adil, diharapkan mampu memperkuat fondasi demokrasi Pancasila dan menghasilkan pemerintahan yang lebih terpercaya serta mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Fajaruddin, F. (2022, June). Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Lembaga

Saputra, I., & Firdaus, F. (2023). Penguatan Nasionalisme Millenial Dalam Politik: Studi Kasus Kader Sekolah Penggerak Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.

SARAN

Peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya partisipasi dalam Pemilu oleh KPU dan Bawaslu sangat diperlukan. Program-program edukatif harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Selain itu, peningkatan infrastruktur logistik harus menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan distribusi surat suara dan peralatan pemungutan suara berjalan lancar. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat, dapat membantu mengatasi tantangan ini dan memastikan Pemilu yang lebih baik di masa depan.

Pengawas Dan Juga Melakukan Penegakan Hukum Menuju Pemilu 2024. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 1, No. 1, pp. 486-493).

Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora, 2(2), 129-136.

Nasution, A. I., Azaria, D. P., Fauzan, M., Abidin, F. R. M., & Alfarissa, T. (2023). Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu

Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 229-256.

Nugraha, M. S. E., & Najicha, F. U. (2023). *Kontribusi Ideologi Pancasila Dalam Proses Pemilihan Umum Di Indonesia*. Researchgate. Net. https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Nugraha-45/publication/376782040_Kontribusi_Ideol

[ogi_Pancasila_Dalam_Proses_Pemilihan_Umum_Di_Indonesia/Links/6586e4620bb2c7472b080bae/Kontribusi-Ideologi-Pancasila-Dalam-Proses-Pemilihan-Umum-Di-Indonesia.Pdf](https://www.researchgate.net/publication/376782040_Kontribusi_Ideologi_Pancasila_Dalam_Proses_Pemilihan_Umum_Di_Indonesia/Links/6586e4620bb2c7472b080bae/Kontribusi-Ideologi-Pancasila-Dalam-Proses-Pemilihan-Umum-Di-Indonesia.Pdf).

Adnan, I. M., Ridwan, R., Siregar, V. A., & Mubarik, M. (2022). *Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*. *Jurnal MultidisiplinMadani (MUDIMA)*, 2(3), 1121-1138.